



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMCL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 041 /SEK/KU.04.2/12/2017

21 Desember 2017

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Tindak Lanjut Catatan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan
Triwulan 3 Tahun Anggaran 2017 terkait PNPB

Yth. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
di-

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Catatan Hasil Reviu Badan Pengawasan Mahkamah Agung atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Triwulan III Tahun Anggaran 2017 perlu disampaikan bahwa:

1. Terdapat estimasi pendapatan yang tidak seharusnya ada/dipungut pada satker Mahkamah Agung RI, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pendapatan Legalisasi Tandatanganan (423411) senilai Rp. 328.576.000,-;
(Daftar satuan kerja terlampir)
2. Terdapat Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada UAPPA yang bukan merupakan tupoksi Mahkamah Agung RI, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pendapatan Penjualan Lainnya (423119) senilai Rp. 24.2229.998,-;
 - Pendapatan Bea Lelang (423227) senilai Rp. 3.000.000;
 - Pendapatan Legalisasi Tandatanganan (423411) senilai Rp. 256.435.000,- .
(Daftar satuan kerja terlampir)
3. Terdapat Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional yang ada pada UAPPA-E1 Badan Urusan Administrasi (BUA) kode Unit Eselon I (01) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pendapatan Pengesahan Surat dibawah Tangan (423412) senilai Rp. 340.000,-;
 - Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera (423413) senilai Rp. 2.838.000,-;
 - Pendapatan Ongkos Perkara (423415) senilai Rp. 29.380.000,-;
 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (423419) senilai Rp. 22.367.850,-
(Daftar satuan kerja terlampir)
4. Atas permasalahan sebagaimana pada nomor 1, karena waktu tidak memungkinkan untuk merevisi, maka satuan kerja diharapkan segera memberikan penjelasannya yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq. Bagian PNPB Biro Keuangan BUA melalui Pengadilan Tingkat Bandingnya masing-masing dengan menyertakan surat keterangan/ Pernyataan alasan mengapa tidak dilakukan Revisi DIPA atas estimasi pendapatan sebagaimana tersebut diatas, apabila satuan kerja sudah menindaklanjuti /sudah melakukan revisi maka satker wajib menyampaikan bukti revisi DIPA atas Estimasi pendapatan tersebut ;
5. Atas permasalahan sebagaimana nomor 2, satuan kerja diharapkan segera melakukan ralat/perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan menyesuaikan pendapatan-pendapatan yang sesuai dengan tupoksi Mahkamah Agung RI bagi satuan kerja yang sudah maupun yang belum meralat wajib mengirimkan dokumen berupa bukti ralat /perbaikan ke KPPN, bukti setor dan surat keterangan/ Pernyataan mengapa terjadi salah akun, yang di kirim melalui Pengadilan Tingkat Banding masing-masing dan satuan kerja wajib menginput ulang ke SAIBA dan E- Rekon dan (daftar satuan kerja terlampir);

Tingkat Banding masing-masing dan satuan kerja wajib menginput ulang ke SAIBA dan E- Rekon. (daftar satuan kerja terlampir);

6. Atas permasalahan sebagaimana nomor 3, satuan kerja diharapkan segera melakukan ralat/perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan menyesuaikan Unit Eselon I pada masing-masing satuan kerja dan satuan kerja wajib menginput ulang ke SAIBA dan E- Rekon (daftar satuan kerja terlampir);
7. Tata cara ralat/perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan memperhatikan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-35/PB/2009 tgl 7 Oktober 2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak;
8. Terkait permasalahan tersebut Nomor 1, 2 dan 3, bagi Peradilan Tingkat Banding masing-masing wajib membuat rekapitulasi permasalahan satuan kerja dibawahnya sebagaimana format matrik terlampir dengan melampirkan dokumen/bukti ralat, bukti setor dan surat keterangan/ Pernyataan dari satuan kerja masing-masing.
9. Batas waktu penyampian ke Bagian PNPB Biro Keuangan BUA atas perbaikan/revisi/ralat sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
10. Dokumen - dokumen perbaikan/revisi/ralat tersebut agar disampaikan ke Bagian PNPB Biro Keuangan melalui surel keuangan.pnbp@yahoo.co.id untuk *softcopy scan pdf dan dikirim melalui Pos untuk hard copy yang asli untuk surat Keterangan/ Pernyataan ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan pada satker masing-masing atau yang mewakili*;
11. Para pejabat yang berwenang pada satuan kerja masing-masing diminta untuk mengawal proses pendataan, pemeriksaan, dan perbaikan, serta memastikan kedepannya agar tidak terdapat estimasi pendapatan maupun realisasi PNPB yang bukan merupakan tupoksi Mahkamah Agung. Hal ini supaya sistem pengendalian internal terkait PNPB berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku;
12. Agar hal ini menjadi perhatian saudara untuk ditindaklanjuti dan diteruskan ke satuan kerja masing-masing.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI


A. S. PUDJOHARSJOYO

Tembusan:

1. Kepala Badan Urusan Administrasi;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

ESTIMASI PENDAPATAN YANG SEHARUSNYA TIDAK ADA
PADA DIPA SATKER MAHKAMAH AGUNG

AKUN : 423411 Estimasi Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Yang Dialokasikan

NO	KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
1	005.03.099101	PENGADILAN NEGERI PURWODADI	4,000,000.
2	005.03.099108	PENGAD LAN NEGERI PURWOREJO	700,000.
3	005.03.099121	PENGAD LAN NEGERI BOYOLALI	8,000,000.
4	005.03.099139	PENGAD LAN NEGERI SIDOARJO	3,950,000.
5	005.03.099146	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	900,000.
6	005.03.099159	PENGADILAN NEGERI MADIUN	1,115,000.
7	005.03.099168	PENGADILAN NEGERI SAMPANG	5,075,000.
8	005.03.099194	PENGADILAN NEGERI KABANJAHE	640,000.
9	005.03.099195	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT	2,000,000.
10	005.03.099196	PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	1,160,000.
11	005.03.099198	PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI	1,170,000.
12	005.03.099200	PENGADILAN NEGERI TARUTUNG	1,320,000.
13	005.03.099201	PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN	2,000,000.
14	005.03.099203	PENGADILAN NEGERI SIBOLGA	4,250,000.
15	005.03.099207	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR	1,050,000.
16	005.03.099218	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG	766,000.
17	005.03.099220	PENGADILAN NEGERI JAMBI	762,000.
18	005.03.099235	PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT	3,100,000.
19	005.03.099237	PENGADILAN NEGERI METRO	620,000.
20	005.03.099240	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	3,000,000.
21	005.03.099243	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	1,425,000.
22	005.03.099250	PENGADILAN NEGERI BUNTOK	540,000.
23	005.03.099252	PENGADILAN NEGERI SAMPIT	2,500,000.
24	005.03.099376	PENGADILAN NEGERI PALU	1,000,000.
25	005.03.099383	PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI	600,000.
26	005.03.099660	PENGADILAN NEGERI KENDARI	600,000.
27	005.03.099685	PENGADILAN NEGERI KOLAKA	190,000.
28	005.03.099728	PENGADILAN NEGERI TUAL	2,300,000.
29	005.03.099931	PENGADILAN NEGERI ATAMBUA	1,200,000.
30	005.03.099952	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	500,000.
31	005.03.099994	PENGADILAN NEGERI MAUMERE	120,000.
32	005.03.109063	PENGADILAN NEGERI STABAT	1,350,000.
33	005.03.109064	PENGADILAN NEGERI BATAM	3,550,000.
34	005.03.400070	PENGADILAN NEGERI MANOKWARI	4,500,000.
35	005.03.400076	PENGADILAN NEGERI SORONG	4,000,000.
36	005.03.400091	PENGADI_LAN NEGERI BIAK	2,500,000.
37	005.03.400164	PENGADI_LAN NEGERI KALABAHI	2,700,000.
38	005.03.400328	PENGADI_LAN NEGERI DUMAI	1,010,000.

39	005.03.400396	PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	5,000,000.
40	005.03.400447	PENGADILAN NEGERI KOTOBARU	1,800,000.
41	005.03.400453	KANTOR PENGADILAN NEGERI KALIANDA	600,000.
42	005.03.400572	PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID	2,015,000.
43	005.03.400601	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PANDAN	1,200,000.
44	005.03.626157	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JA'WA TIMUR	4,250,000.
45	005.03.663048	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	240,000.
46	005.03.670192	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG	310,000.
47	005.03.670249	PENGADILAN NEGERI BUOL	1,750,000.
48	005.03.672949	PENGADILAN NEGERI RANAI	55,000.
49	005.03.672970	PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM	230,000.
50	005.03.681440	PENGADILAN NEGERI ANDOOLO	800,000.
51	005.03.689980	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU	160,000.
52	005.04.309104	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	430,000.
53	005.04.309114	PENGADILAN AGAMA DOMPU	7,810,000.
54	005.04.400705	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	44,400,000.
55	005.04.400751	PENGADILAN AGAMA CIREBON	1,940,000.
56	005.04.400782	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	30,000,000.
57	005.04.400818	PENGADILAN AGAMA RANGKAS BITUNG	2,410,000.
58	005.04.400861	PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	600,000.
59	005.04.400912	PENGADILAN AGAMA SEMARANG	600,000.
60	005.04.400952	PENGADILAN AGAMA PURWODADI	2,400,000.
61	005.04.400968	PENGADILAN AGAMA PATI	600,000.
62	005.04.400983	PENGADILAN AGAMA JEPARA	600,000.
63	005.04.401019	PENGADILAN AGAMA MAGELANG	600,000.
64	005.04.401025	PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG	295,000.
65	005.04.401031	PENGADILAN AGAMA WONOSOBO	600,000.
66	005.04.401062	PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	500,000.
67	005.04.401071	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	600,000.
68	005.04.401087	PENGADILAN AGAMA CILACAP	30,100,000.
69	005.04.401093	PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA	600,000.
70	005.04.401122	PENGADILAN AGAMA KLATEN	500,000.
71	005.04.401201	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	6,360,000.
72	005.04.401202	PENGADILAN AGAMA SLEMAN	22,260,000.
73	005.04.401793	PENGADILAN AGAMA KABANJAHE	20,000.
74	005.04.401804	PENGADILAN AGAMA MEDAN	2,680,000.
75	005.04.401948	PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	1,235,000.
76	005.04.402036	PENGADILAN AGAMA TALU	12,000,000.
77	005.04.402042	PENGADILAN AGAMA MANINJAU	2,660,000.
78	005.04.402303	PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG	6,000,000.
79	005.04.402331	PENGADILAN AGAMA KRUI	3,000,000.
80	005.04.402356	PENGADILAN AGAMA METRO	1,200,000.
81	005.04.402407	PENGADILAN AGAMA SINTANG	215,000.
82	005.04.402532	PENGADILAN AGAMA KANDANGAN	330,000.

83	005.04.402764	PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG	120,000.
84	005.04.402795	PENGADILAN AGAMA LARANTUKA	173,000.
85	005.04.402912	PENGADILAN AGAMA MANOKWARI	2,500,000.
86	005.04.403078	PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM	270,000.
87	005.04.614711	PENGADILAN AGAMA KAJEN	310,000.
88	005.04.652042	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	790.000.
89	005.04.652063	PENGADILAN AGAMA DEPOK	840.000.
90	005.04.690072	PENGADILAN AGAMA PARIGI	3,335.000.
91	005.04.690182	PENGADILAN AGAMA ARSO	10.000.
92	005.05.526705	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA	4,000,000.
93	005.05.526733	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	12,000,000.
94	005.05.531866	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	3,000,000.
95	005.05.578802	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA	900,000.
96	005.05.578840	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	600,000.
97	005.05.578844	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	3,000,000.
98	005.05.578865	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI	1,570,000.
99	005.05.690197	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG	240,000.
100	005.05.690202	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	7,000,000.
TOTAL			328,576,000.

REALISASI PNBP PADA UAPPA YANG BUKAN TUPOKSI MAHKAMAH AGUNG

AKUN : 423119 Pendapatan Penjualan Lainnya

NO.	KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
1	005.01.097975	PENGADILAN NEGERI KARANGAYAR	(15,199,999.)
2	005.01.401143	PENGADILAN AGAMA SRAGEN	(8,799,999.)
3	005.03.681440	PENGADILAN NEGERI ANDOULO	(30,000.)
4	005.04.401351	PENGADILAN AGAMA SITUBONDO	(200,000.)
TOTAL			(24,229,998.)

AKUN : 423227 Pendapatan Bea Lelang

NO.	KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
1	005.01.400647	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR	(3,000,000.)
TOTAL			(3,000,000.)

AKUN : 423411 Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan

NO.	KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
1	005.03 099064	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	(3,330,000.)
2	005.C3 099095	PENGADILAN NEGERI KUDUS	(130,000.)
3	005.C3.099101	PENGADILAN NEGERI PURWODADI	(190,000.)
4	005.C3.099107	PENGADILAN NEGERI BATANG	(300,000.)
5	005.C3.099121	PENGADILAN NEGERI BOYOLALI	(355,000.)
6	005.C3.099130	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	(100,000.)
7	005.C3.099139	PENGADILAN NEGERI SIDOARJO	(35,000.)
8	005.03.099144	PENGADILAN NEGERI JEMBER	(165,000.)
9	005.03.099165	PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN	(20,000.)
10	005.03.099167	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	(915,000.)
11	005.03.099184	PENGADILAN NEGERI MEULABOH	(10,000.)
12	005.03.099191	PENGADILAN NEGERI BINJAI	(1,150,000.)
13	005.03.099194	PENGADILAN NEGERI KABANJAHE	(60,000.)
14	005.03.099195	PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT	(20,000.)
15	005.03.099196	PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI	(330,000.)
16	005.03.099199	PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR	(150,000.)
17	005.03.099205	PENGADILAN NEGERI PADANG	(1,015,000.)
18	005.03.099207	PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR	(80,000.)
19	005.03.099208	PENGADILAN NEGERI SOLOK	(280,000.)
20	005.03.099213	PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH	(20,000.)
21	005.03.099222	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	(10,000.)
22	005.03.099239	PENGADILAN NEGERI PONTIANAK	(475,000.)
23	005.03.099240	PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG	(1,975,000.)

24	005.03.399243	PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH	(130,000.)
25	005.03.399246	PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA	(120,000.)
26	005.03.399334	PENGADILAN NEGERI KOTAMUBAGO	(70,000.)
27	005.03.399383	PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI	(50,000.)
28	005.03.399444	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	(55,000.)
29	005.03.399451	PENGADILAN NEGERI BARRU	(50,000.)
30	005.03.399508	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	(680,000.)
31	005.03.399618	PENGADILAN NEGERI MAKALE	(115,000.)
32	005.03.399639	PENGADILAN NEGERI MAMUJU	(135,000.)
33	005.03.399643	PENGADILAN NEGERI POLEWALI	(170,000.)
34	005.03.399770	PENGADILAN NEGERI SOASIU	(165,000.)
35	005.03.399952	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU	(540,000.)
36	005.03.109064	PENGADILAN NEGERI BATAM	(275,000.)
37	005.C3.240166	PENGADILAN NEGERI OELAMASI	(150,000.)
38	005.C3.400039	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	(75,000.)
39	005.C3.400164	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	(30,000.)
40	005.03.400195	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	(140,000.)
41	005.03.477250	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO	(95,000.)
42	005.03.477369	PENGADILAN NEGERI TEBO	(70,000.)
43	005.03.477402	PENGADILAN NEGERI TANJUNG JAEUNG TIMUR	(10,000.)
44	005.03.613520	PENGADILAN NEGERI KAB.BOGOR DI CIBINONG, JAWA BARAT	(3,360,000.)
45	005.03.626157	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JAWA TIMUR	(265,000.)
46	005.03.663048	PENGADILAN NEGERI SUKADANA	(5,000.)
47	005.03.673010	PENGADILAN NEGERI TAIS	(45,000.)
48	005.03.679426	PENGADILAN NEGERI KASONGAN	(205,000.)
49	005.04.309070	PENGADILAN AGAMA UJUNG PANDANG	(340,000.)
50	005.04.309099	PENGADILAN AGAMA TUAL	(335,000.)
51	005.04.309104	PENGADILAN AGAMA LABUHAN BACAN	(20,000.)
52	005.04.309106	PENGADILAN AGAMA SINGARAJA	(90,000.)
53	005.04.309118	PENGADILAN AGAMA ENDE	(105,000.)
54	005.04.400632	PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT	(500,000.)
55	005.04.400705	PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA	(19,225,000.)
56	005.04.400711	PENGADILAN AGAMA GARUT	(33,090,000.)
57	005.04.400730	PENGADILAN AGAMA BOGOR	(400,000.)
58	005.04.400742	PENGADILAN AGAMA CIANJUR	(435,000.)
59	005.04.400751	PENGADILAN AGAMA CIREBON	(970,000.)
60	005.04.400798	PENGADILAN AGAMA SERANG	(165,000.)
61	005.04.400802	PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG	(160,000.)
62	005.04.400855	PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA	(5,885,000.)
63	005.04.400952	PENGADILAN AGAMA PURWODADI	(2,140,000.)
64	005.04.401003	PENGADILAN AGAMA BLORA	(265,000.)
65	005.04.401019	PENGADILAN AGAMA MAGELANG	(4,360,000.)
66	005.04.401062	PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	(325,000.)
67	005.04.401071	PENGADILAN AGAMA BANYUMAS	(19,045,000.)

68	005.04.401093	PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA	(35,780,000.)
69	005.04.401122	PENGADILAN AGAMA KLATEN	(70,000.)
70	005.04.401144	PENGADILAN AGAMA SRAGEN	(40,455,000.)
71	005.04.401169	PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO	(55,000.)
72	005.04.401201	PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	(590,000.)
73	005.04.401220	PENGADILAN AGAMA WATES	(720,000.)
74	005.04.401226	PENGADILAN AGAMA BANTUL	(765,000.)
75	005.04.401232	PENGADILAN AGAMA WONOSARI	(1,470,000.)
76	005.04.401339	PENGADILAN AGAMA JEMBER	(40,000.)
77	005.04.401370	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	(7,600,000.)
78	005.04.401376	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI	(420,000.)
79	005.04.401403	PENGADILAN AGAMA BLITAR	(60,000.)
80	005.04.401509	PENGADILAN AGAMA NGAWI	(60,000.)
81	005.04.401515	PENGADILAN AGAMA PONOROGO	(10,000.)
82	005.04.401540	PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN	(5,080,000.)
83	005.04.401628	MAHKAMAH SYAR'IAH MEUREUDU	(120,000.)
84	005.04.401671	MAHKAMAH SYAR'IAH IDI	(50,000.)
85	005.04.401860	PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR	(30,000.)
86	005.04.401897	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SITOLI	(20,000.)
87	005.04.401948	PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR	(45,000.)
88	005.04.402073	PENGADILAN AGAMA PEKANBARU	(20,000.)
89	005.04.402118	PENGADILAN AGAMA BENGKALIS	(60,000.)
90	005.04.402221	PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH	(180,000.)
91	005.04.402252	PENGADILAN AGAMA LAHAT	(515,000.)
92	005.04.402268	PENGADILAN AGAMA BATURAJA	(60,000.)
93	005.04.402274	PENGADILAN AGAMA KAYU AGUNG	(30,000.)
94	005.04.402319	PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN	(95,000.)
95	005.04.402407	PENGADILAN AGAMA SINTANG	(165,000.)
96	005.04.402469	PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS	(10,000.)
97	005.04.402532	PENGADILAN AGAMA KANDANGAN	(330,000.)
98	005.04.402588	PENGADILAN AGAMA SUBANG	(3 710,000.)
99	005.04.402594	PENGADILAN AGAMA AMBARAWA	(50,000.)
100	005.04.402733	PENGADILAN AGAMA NEGARA	(100,000.)
101	005.04.402821	PENGADILAN AGAMA SOE	(20,000.)
102	005.04.402846	PENGADILAN AGAMA BAJAWA	(35,000.)
103	005.04.402959	PENGADILAN AGAMA MERAUKE	(420,000.)
104	005.04.403010	PENGADILAN AGAMA SUMBER	(40,000.)
105	005.04.403022	PENGADILAN AGAMA MUNGKID	(1 740,000.)
106	005.04.403047	PENGADILAN AGAMA KEDIRI	(30,000.)
107	005.04.450738	PENGADILAN AGAMA TUBAN	(3 735,000.)
108	005.04.604720	PENGADILAN AGAMA CIBINONG	(43,885,000.)
109	005.04.604724	PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA	(90,000.)
110	005.04.614711	PENGADILAN AGAMA KAJEN	(120,000.)
111	005.04.631983	PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN	(5,000.)

112	005.04.352042	PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	(35,000.)
113	005.04.352063	PENGADILAN AGAMA DEPOK	(330,000.)
114	005.05.526733	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	(20,000.)
115	005.05.531824	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG	(970,000.)
116	005.05.531852	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK	(50,000.)
117	005.05.539118	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON	(20,000.)
118	005.05.578844	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA	(20,000.)
119	005.05.690202	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	(130,000.)
TOTAL			(256,435,000.)

REALISASI PNBP FUNGSIONAL YANG ADA PADA UAPPA-E1 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
KODE UNIT ESELON I (01)

AKUN : 423412 Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan

NO	KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
1	005.01.626156	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JAWA TIMUR	340,000.
TOTAL			340,000.

AKUN : 423413 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Bacan Pengadilan (Peradilan)

NO	KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
1	005.01.400781	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	2,589,000.
2	005.01.578839	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	6,000.
3	005.01.626156	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JAWA TIMUR	243,000.
TOTAL			2,838,000.

AKUN : 423415 Pendapatan Ongkos Perkara

NO	KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
1	005.01.400781	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	21,250,000.
2	005.01.401174	PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR	4,720,000.
3	005.01.578839	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	330,000.
4	005.01.626156	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JAWA TIMUR	3,080,000.
TOTAL			29,380,000.

AKUN : 423419 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya

NO	KODE	NAMA SATKER	JUMLAH
1	005.01.098811	PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI	150,000.
2	005.01.400781	PENGADILAN AGAMA KUNINGAN	17,280,500.
3	005.01.401174	PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR	3,458,000.
4	005.01.578839	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI	66,400.
5	005.01.626156	PENGADILAN NEGERI KAB.MALANG, JAWA TIMUR	1,412,950.
TOTAL			22,367,850.

REKAPITULASI TANGGAPAN ATAS HASIL REVIU BADAN PENGAWASAN MA - RI
ATAS LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG PER TRIWULAN III TA 2017
(PER NOVEMBER 2017)

KKR LRA.01

1. Terdapat Estimasi Pendapatan yang tidak seharusnya ada/dipungut pada satker MA-RI Yaitu :

AKUN : 423411 Estimasi Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Yang dialokasikan

CATATAN HASIL REVIU BAWAS					HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
No	KODE AKUN	URAIAN	SATKER	JUMLAH		
1						

Keterangan :

Nomor : Berisi nomor urut
Kode Akun : Cantumkan Kode Akun yang terkait Permasalahan
Uraian : Jenis Akun Bermasalah
Satker : Nama Satuan Kerja terkait
Jumlah : Nilai Nominal (dalam rupiah)
Hasil Tindak Lanjut : Memberikan penjelasan Pokok permasalahan
Keterangan : Menjelaskan apakah sudah direvisi, Ralat, data dukung terlampir.

**TANGGAPAN ATAS HASIL REVIU BADAN PENGAWASAN MA - RI
 ATAS LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG PER TRIWULAN III TA 2017
 (PER NOVEMBER 2017)**

KKR LRA.02

2. Terdapat Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada UAPA yang bukan merupakan Tupoksi MA-RI yaitu :

AKUN : 423119 Pendapatan penjualan lainnya
 AKUN: 423227 Pendapatan Bea Lelang
 AKUN : 423411 Pendapatan Legalisasi Tanda tangan

CATATAN HASIL REVIU BAWAS					HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
No	KODE AKUN	URAIAN	SATKER	JUMLAH		
1						

Keterangan :

Nomor : Berisi nomor urut
 Kode Akun : Cantumkan Kode Akun yang terkait Permasalahan
 Uraian : Jenis Akun Bermasalah
 Satker : Nama Satuan Kerja terkait
 Jumlah : Nilai Nominal (dalam rupiah)
 Hasil Tindak Lanjut : Memberikan penjelasan Pokok permasalahan
 Keterangan : Menjelaskan apakah sudah direvisi, Ralat, data dukung terlampir.

TANGGAPAN ATAS HASIL REVIU BADAN PENGAWASAN MA - RI
 ATAS LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG PER TRIWULAN III TA 2017
 (PER NOVEMBER 2017)

KKR LRA.03

3. Terdapat Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional yang ada pada UAPA -E1 Badan Urusan Administrasi (BUA) Kode Unit Eselon I (01) yaitu :

- AKUN : 423412 Pendapatan Pengesahan Surat dibawah tangan
- AKUN: 423413 Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera
- AKUN : 423415 Pendapatan Ongkos Perkara
- AKUN : 423419 Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya

CATATAN HASIL REVIU BAWAS					HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
No	KODE AKUN	URAIAN	SATKER	JUMLAH		
1						

Keterangan :

Nomor : Berisl nomor urut

Kode Akun : Cantumkan Kode Akun yang terkait Permasalahan

Uraian : Jenis Akun Bermasalah

Satker : Nama Satuan Kerja terkait

Jumlah : Nilai Nominal (dalam rupiah)

Hasil Tindak Lanjut : Memberikan penjelasan Pokok permasalahan

Keterangan : Menjelaskan apakah sudah direvisi, Ralat, data dukung terlampir.